KAJIAN KELEMBAGAAN DALAM PENANGANAN KASUS DUMPING LIMBAH B3 â€œSUMOBITOâ€• OLEH BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA
Muammar Fikri Zamani, Prof. Dr. Lutfi Muta`ali, S.Si., MT.; Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H.,M.Hum.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi
INTISARI xii
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah 4
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Keaslian Penelitian 8
1.5. Manfaat Penelitian 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Telaah Pustaka: Konsep dan Teori 14
2.1.1. Konsep Kinerja 14
2.1.2. Kinerja Organisasi 14
2.1.3. Lembaga dan Kelembagaan 16
2.1.4. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 18
2.1.5. Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 20
2.1.6. Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 21
2.2. Kerangka Pikir Penelitian 22
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Lokasi Penelitian 24
3.2. Jenis Data dan Variabel Penelitian 25
3.3. Alat dan Bahan Penelitian 25
3.4. Cara Penentuan Informan 26
3.5. Cara Mengumpulkan Data 27
3.6. Cara Analisis Data 29
3.6.1. Analisis Kinerja Kelembagaan dalam Penanganan Kasus Dumping Limbah B3 di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang oleh BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara 32
3.6.2. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kelembagaan dalam Penanganan Kasus Dumping Limbah B3 di

KAJIAN KELEMBAGAAN DALAM PENANGANAN KASUS DUMPING LIMBAH B3 â€œSUMOBITOâ€• OLEH BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA
Muammar Fikri Zamani, Prof. Dr. Lutfi Muta`ali, S.Si., MT.; Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H.,M.Hum.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang oleh BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara 33
3.6.3. Strategi dan Kebijakan untuk Meningkatkan Fungsi Kelembagaan BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam Penanganan Kasus Dumping Limbah B3 Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang 33
3.7. Tahapan Penelitian 34
3.8. Batasan Operasional 36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Umum Wilayah Penelitian 37
4.1.1. Kondisi Lahan 37
4.1.2. Lingkungan Kultural (Sosial Ekonomi Budaya) 40
4.1.2.a. Kondisi Kependudukan 40
4.1.2.b. Kondisi Sosial Ekonomi 42
4.1.2.c. Kondisi Sosial Budaya 43
4.1.3. Gambaran Umum Industri dan Pencemaran Limbah B3 45
4.2. Kinerja Kelembagaan dalam Penanganan Kasus Dumping Limbah B3 di Kecamatan Sumobito 57
4.2.1. Deskripsi Persepsi 60
4.2.1.a. Peran Lembaga Penegakan Hukum 60
4.2.1.b. Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah 67
4.2.1.c. Informasi Lembaga Publik 70
4.2.1.d. Transparansi Penanganan Kasus 76
4.2.1.e. Kapasitas Penyidik 81
4.2.1.f. Penegakan Hukum Lingkungan 85
4.2.1.g. Koordinasi dan Sinergi Antar Instansi 93
4.2.1.h. Sarana dan Prasaranan Pendukung 99
4.2.1.i. Ketersediaan Anggaran Penanganan Kasus 107
4.2.2. Konseptualisasi Persepsi Publik Terhadap Kinerja BPPHLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara 111
4.2.2.a. Integrasi Fungsi Penegakan Hukum (*Legal structure*) 112
4.2.2.b. Penguatan Basis Legal (*Legal substance*) 114
4.2.2.c. Budaya Sadar Lingkungan Masyarakat (*Legal culture*) 117
4.2.3. Hubungan Antar Konsep 120
4.3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kelembagaan dalam Penanganan Kasus Dumping Limbah B3 di Kecamatan Sumobito .. 121
4.3.1. Peran Lembaga Hukum Belum Optimal 122
4.3.2. Rendahnya Budaya Hukum 123
4.3.3. Komitmen Pemerintah Daerah yang Rendah 125
4.3.4. Informasi Lembaga Publik yang Minim 126
4.3.5. Transparansi Penanganan Kasus yang Belum Berjalan 127
4.3.6. Kapasitas Penyidik yang Belum Maksimal 128
4.3.7. Penegakan Hukum yang Lemah 130

KAJIAN KELEMBAGAAN DALAM PENANGANAN KASUS DUMPING LIMBAH B3 â€œSUMOBITOâ€• OLEH BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA
Muammar Fikri Zamani, Prof. Dr. Lutfi Muta`ali, S.Si., MT.; Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H.,M.Hum.,LL.M
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4.3.8. Sarana dan Prasarana Pendukung yang Minim 132
4.3.9. Sinergi antar Instansi yang Belum Sepenuhnya Berjalan..... 133
4.3.10 Anggaran yang Minim 135
4.4. Strategi dan Kebijakan untuk Meningkatkan Fungsi Kelembagaan BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam Penanganan Kasus Dumping Limbah B3 Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang 136
4.4.1. Analisis SWOT Kelembagaan BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara 136
4.4.2. Rumusan Strategi dan Kebijakan untuk Penguatan Kelembagaan BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara ... 138
4.4.2.a. Penguatan Kelembagaan dan Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan 141
4.4.2.b. Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Antar Lembaga..... 142
4.4.2.c. Pemanfaatan Teknologi Digital 144
4.4.2.d. Keterbukaan Sistem Informasi Publik 144
4.4.2.e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana 145
4.4.2.f. Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Intelijen 147
4.4.2.g. Pemanfaatan Skema Pembiayaan Alternatif 148
4.4.2.h. Peningkatan Edukasi Hukum Masyarakat 150
4.4.2.i. Penguatan Pengawasan Internal 151
4.4.2.j. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Lingkungan 153
4.4.2.k. Penetapan Prioritas Penanganan Kasus Berdasarkan Tingkat Urgensi 154
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 156
5.1. Kesimpulan 156
5.2. Saran 157
DAFTAR PUSTAKA 158
LAMPIRAN 163